

PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU DIGITALISASI TAHUN 2024 DI KAMPUNG HOLTEKAMP DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA

Peliman Ndibau¹⁾, Lina Andayani¹⁾, Sahriani¹⁾, Mursid²⁾

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan ²Program Studi Teknik Informatika

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : pelimandibau01@gmail.com

Abstrak

Kampung Holtekamp terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Wilayah Kampung Holtekamp terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan Rukun Warga (RW) dan terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT). Teknologi digital dalam Tata Kelola Pemerintahan pada era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan dalam Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang merupakan perwujudan dari tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tata kelola Pemerintahan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura, sampai saat ini penerapan proses pelayanan administrasi surat menyurat bagi masyarakat masih dilakukan secara manual, hal ini berpengaruh terhadap waktu tunggu surat keluar yang tidak tepat waktu. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan pendampingan secara langsung kepada Pemerintah dan masyarakat Kampung Holtekamp khususnya dalam tata kelola Pemerintahan berbasis sistem informasi, yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi dan aplikasi Pace Mace Dukcapil. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pendampingan penginputan data kependudukan berbasis sistem informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kampung dan masyarakat agar lebih dimudahkan dalam proses pengurusan administrasi surat menyurat.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintahan, Digitalisasi

1. PENDAHULUAN

Tata kelola Pemerintahan yang baik ditingkat Desa membuka peluang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, digitalisasi dalam perencanaan tata kelola Pemerintahan Desa tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penerapan teknologi harus selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Tata kelola pemerintahan adalah seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, pemenuhan kewajiban, serta menjadi penghubung ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang ada diantara mereka.[1]

Teknologi terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang dipercayai sebagai bentuk perubahan. Kemajuan teknologi selalu terjadi sebagai bentuk perolehan kemudahan dalam menjalankan aktifitas di berbagai sektor, salah satunya pertumbuhan ekonomi digital. Perkembangan zaman ke era digital membawa manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi secara cepat, berkualitas, dan efisien.

Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan perwujudan dari tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan sebagai perwujudan dari pelaksanaan manajemen organisasi yang dinamis, yang dapat dilakukan dengan cara memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. [2]

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Otonomi Desa dicirikan oleh penerimaan penggunaan atribut Desa, hak menolak kewenangan distributif dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, posisi Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten untuk memperpendek birokrasi.[3]

Wewenang yang dimiliki Desa mendorong agar Desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara baik, transparansi, dan akuntabel. Pengembangan digitalisasi di Pemerintahan Desa sangat bermanfaat untuk kemajuan daerah. Digitalisasi Desa dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas Desa dan mempercepat layanannya. Teknologi mampu membantu dalam segala aspek. Kreatifitas suatu daerah sesungguhnya dapat dibantu dengan memanfaatkan teknologi di pedesaan secara efektif.[4]

Salah satu poin kunci terkait tata kelola pemerintahan ditingkat Desa adalah berkaitan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dalam kaitannya dengan E-Government ditingkat Desa merupakan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi dan layanan publik, seperti pembayaran pajak online atau aplikasi pelayanan kesehatan dan administrasi surat. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Desa, maka dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dalam menetapkan indikator kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa. Serta adanya mekanisme umpan balik dalam membangun sistem umpan balik dari masyarakat untuk terus meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kampung Holtekamp diantaranya proses administrasi yang masih manual, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, dan keterbatasan teknologi dalam pengelolaan data. Selain itu, dampak dari ketidaklancaran komunikasi dengan masyarakat setempat menjadi potensi kesulitan untuk mendapatkan akses publik, ketidakpastian, dan konsekuensi sosial akibat kurangnya upaya dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan. Disisi lain dalam proses pelayanan E-KTP, Akte Kelahiran dan kartu keluar, masyarakat harus mendatangi pusat pelayanan pembuatan dokumen tersebut dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari wilayah Kampung Holtekamp bahkan adapun masyarakat yang belum paham akan penggunaan media pelayanan online "PACE MACE DUKCAPIL".

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya prosedur pelayanan yang jelas dan aplikasi sederhana untuk mempermudah tugas Pemerintah Kampung dan mendukung pelaksanaan proses pelayanan administrasi yang efektif.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, maka Tim PkM USTJ bekerjasama dengan Pemerintah Distrik Muara Tami dan Pemerintah Kampung Holtekamp untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kegiatan PkM ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan tata kelola Pemerintahan menuju digitalisasi dan penggunaan aplikasi Pace Mace Dukcapil.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang kami lakukan pada pengabdian ini adalah:

2.1. Persiapan dan pembekalan

Adapun tahap persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut:

1. Survei Lokasi, Persiapan awal pelaksanaan kegiatan PkM oleh Tim Dosen dan mahasiswa dimulai dengan melakukan observasi ke wilayah setempat guna memahami kondisi masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan dari Pemerintah Kampung yang ada di lokasi tersebut.
2. Pengamatan Teritorial Kampung, kegiatan selanjutnya yang dilakukan sebelum pelaksanaan program kegiatan PkM, terlebih dahulu tim dosen bersama mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM melakukan observasi masalah pengurusan administrasi surat menyurat di Kampung Holtekamp yang akan dijadikan lokasi untuk kegiatan tersebut, sehingga dapat mengetahui situasi yang ada di lapangan, kondisi masyarakat, serta informasi tentang geografis Kampung yang diperoleh melalui data-data ataupun hasil wawancara.
3. Koordinasi, setelah melakukan survei dan pengamatan teritorial Kampung tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kepala/Sekretaris Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami serta Kepala Urusan Pemerintahan Kampung untuk rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah tersebut. Hasil koordinasi yang dibangun untuk

mendapatkan kesepakatan bersama pihak Kampung dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tingkat Kampung berkaitan dengan pelayanan administrasi surat menyurat yang masih dilakukan secara manual, dan hal ini menjadi perhatian dari akademisi untuk ikut memberikan solusi dan mengabdikan diri sebagai bentuk kewajiban dari dosen-dosen di lingkungan USTJ.

Sebelum melakukan pelatihan dan pendampingan tata kelola Pemerintahan menuju digitalisasi Tahun 2024 bagi Pemerintah dan masyarakat Kampung Holtekamp, tim dosen PkM juga melakukan pembekalan terhadap anggota tim dosen yang terkait, serta mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian ini, antara lain persiapan sosialisasi kepada Pemerintah dan masyarakat Kampung di wilayah Kampung Holtekamp. Selain itu kami juga menyiapkan perlengkapan atau alat pendukung lainnya seperti absensi peserta, konsumsi, media elektronik (LCD, Kamera, laptop, printer).

Untuk kelancaran pelatihan tata kelola Pemerintahan disiapkan Smartphone dan laptop agar dapat mempermudah peserta sosialisasi dalam mengakses aplikasi yang dijadikan sebagai contoh dalam penginputan data administrasi kependudukan dan proses pengurusan surat menyurat .

Bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dapat dilihat dalam persiapan awal sampai akhir, dalam proses memandu acara sosialisasi, mengatur ruangan, bahkan pada saat pelatihan dan pendampingan tata kelola Pemerintahan. Evaluasi kegiatan pengabdian ini didukung juga oleh pihak LP2M USTJ dalam proses administrasi surat yang dibutuhkan dan pengecekan laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belum adanya aplikasi dalam menunjang pelayanan administrasi surat menyurat di Kampung Holtekamp. Disisi lain sebagian masyarakat belum memahami terkait pelayanan E-KTP dan berkas penting lainnya melalui aplikasi Pace Mace Dukcapil.

2. Tanya Jawab dan Diskusi

Dalam proses Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan “Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan” dan “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pace Mace Dukcapil” yang dilakukan oleh Tim Dosen PkM sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Setelah kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan pengurusan administrasi kependudukan melalui aplikasi sistem informasi dan aplikasi Pace Mace Dukcapil yang dihadiri oleh Pemerintah Kampung serta masyarakat di wilayah Kampung Holtekamp. Selama proses pelatihan dan pendampingan berlangsung, Tim Dosen dan mahasiswa memberi ruang diskusi bagi peserta untuk menyampaikan atau menanyakan hal-hal yang menjadi kendala dalam praktek penginputan data administrasi kependudukan tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Pemerintah Kampung dan masyarakat bisa secara langsung memahami dan mengikuti pelatihan dengan lancar sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.

3. Metode Pendampingan dan pelatihan

Proses pendampingan dan pelatihan tata kelola Pemerintahan terhadap aparat Kampung Holtekamp dilakukan dengan cara membagikan materi (Modul) penggunaan aplikasi sistem informasi yang berisi tata cara atau prosedur penggunaan aplikasi sistem informasi dalam pengurusan administrasi surat menyurat di Kampung Holtekamp, kemudian memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat tentang proses penggunaan aplikasi Pace Mace Dukcapil.

4. Evaluasi

Dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan selama satu bulan diharapkan dapat menjadi akhir yang baik dalam upaya tata kelola Pemerintahan menuju digitalisasi Tahun 2024 bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Kampung Holtekamp. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kontribusi yang positif dan selalu memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Kampung agar pengurusan administrasi kependudukan dilakukan menggunakan sistem informasi agar pelaksanaannya lebih efektif.

Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1.	Persiapan /Pembekalan				
	a. Observasi				
	b. Identifikasi Masalah				

	c. Pengumpulan Data				
	d. Pembekalan				
2.	Kegiatan PkM				
	a. Survey lapangan				
	b. Koordinasi dengan Distrik/Kampung				
	c. Sosialisasi				
	d. Evaluasi				
3.	Penyusunan Laporan				
4.	Publikasi				

2.3. Kampung Holtekamp

Lokasi Kampung Holtekamp (gambar 1) terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Wilayah Kampung Holtekamp terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan Rukun Warga (RW) dan terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1. Kantor Kampung Holtekamp

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasahan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang pendampingan dan pelatihan tata kelola Pemerintahan menuju digitalisasi 2024 di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Sosialisasi dan Pendampingan

A. Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Pentingnya tata kelola Pemerintahan dalam proses pelayanan administrasi surat menyurat baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. kunci dari tata kelola Pemerintahan adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah dan diskusi, keterbukaan dan akuntabilitas baik dalam pengelolaan keuangan maupun akuntabilitas publik, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam bentuk E-Government di tingkat Kampung dan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (gambar 2). Dalam sosialisasi tersebut kami juga menyampaikan bahwa tata kelola Pemerintahan yang baik di tingkat Daerah membuka peluang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 3. Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Kampung

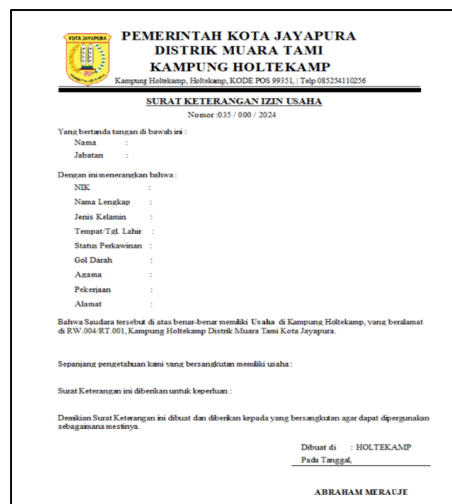
Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut kami tim Dosen PkM bersama mahasiswa sekaligus melakukan pendampingan secara langsung kepada seluruh peserta sosialisasi tentang penggunaan aplikasi sistem informasi dalam pengurusan surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat di Kantor Kampung Holtekamp. Dan juga mendampingi dalam penggunaan aplikasi kependudukan Pace Mace Dukcapil agar dapat mempermudah tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Holtekamp (gambar 4).



Gambar 4. Pendampingan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Aplikasi Pace Mace Dukcapil

3.2. Pembuatan Aplikasi Sistem Informai Administrasi Surat Menyurat

Aplikasi administrasi surat menyurat dibuat dengan tujuan untuk lebih mempermudah proses pelayanan administrasi surat menyurat di Kampung Holtekamp dimana selama ini masih dilakukan menggunakan microsoft office word (gambar 5).

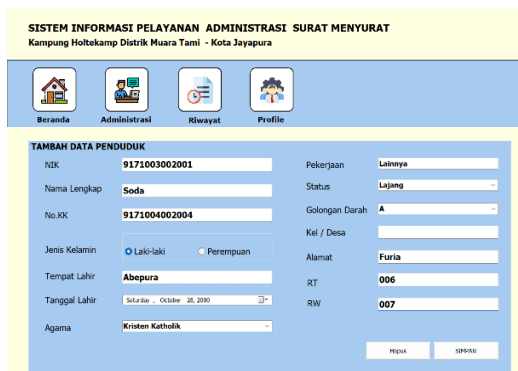


Gambar 5. Contoh Format Surat yang masih menggunakan Microsoft Office Word

Pembuatan aplikasi surat menyurat di Kampung Holtekamp dimulai dengan membuat *flowchart* yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah, selanjutnya melakukan perancangan input dan output, yang mana perancangan input merupakan awal dimulainya proses informasi. Data

mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh organisasi.

Formulir adalah perangkat penting untuk menangkap (*capture*) data yang terjadi, sering juga disebut dokumen dasar. Tujuan dari perancangan *input* adalah membuat penyelesaian *input* yang mudah, efisien, dan konsisten. Sedangkan perancangan *output* sendiri adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi dapat berupa *hardcopy* atau *softcopy*, melalui intranet, ektranet, atau *world wide web*. Setelah melakukan perancangan *input* dan *output*, selanjutnya memulai membuat program aplikasi administrasi surat. Dan langkah terakhir adalah melakukan uji coba aplikasi administrasi tersebut (gambar 6).



Gambar 6. Format Sistem Informasi Pelayanan Adminitrasi Surat Menyurat

3.3. Pembuatan Banner

A. Banner Prosedur Penggunaan Aplikasi Administrasi Surat Menyurat

Banner prosedur aplikasi administrasi surat menyurat menampilkan prosedur pembuatan surat menyurat di Kantor Kampung Holtekamp seperti surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, surat rekomendasi dan surat keterangan tidak mampu. Banner tersebut dibuat agar masyarakat dan Aparat Kampung dapat mengetahui alur pembuatan surat menyurat di Kantor Kampung Holtekamp, dengan menggunakan aplikasi sistem informasi (gambar 7).



Gambar 7. Banner Prosedur Penggunaan Aplikasi Administrasi Surat Menyurat

B. Banner Prosedur Penggunaan Aplikasi Pace Mace Dukcapil

Banner prosedur aplikasi Pace Mace Dukcapil menampilkan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimulai dari mengakses halaman web Pace Mace Dukcapil, melakukan pendaftaran, menginput data

diri dan berkas SKP dan KK, hingga pengambilan KTP di Kantor Dukcapil. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Kampung dengan mudah mengakses halaman web Pace Mace Dukcapil dan mengajukan permohonan pembuatan surat sesuai dengan yang dibutuhkan (gambar 8).



Gambar 8. Banner Prosedur Penggunaan Pace Mace Dukcapil

4. SIMPULAN

Tata kelola Pemerintahan berbasis sistem informasi dalam proses pengurusan administrasi surat menyurat sangat penting untuk dilakukan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura agar dapat mempermudah Pemerintah Kampung dalam memberikan pelayanan administrasi surat menyurat yang efektif dan efisien.

5. SARAN

Diharapkan untuk kedepannya pemerintah Kampung Holtekamp terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi dan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi pengurusan surat menyurat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tim PkM sampaikan kepada Dr. Yuyun N. Ali Kastella, M.Pd selaku Rektor USTJ, Dr. Ir. Jusuf Haurrisa, MT selaku Kepala LP2M USTJ, Bapak Abraham Merauje selaku Kepala Kampung Holtekamp, Bapak Ferry A. Mansi, S.IP, atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ilham, E-Governance, Pertama Ap. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- [2] I. P. J. Arsana, Manajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Pertama. Yogyakarta: CV Budi tama, 2016.
- [3] N. Irawan, Tata kelola Pemerintahan desa Era UU Desa, Pertama. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- [4] D. Riana Mayasari, Digitalisasi desa, Pertama. Pekalongan Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.